

Daftar Pustaka

- Abdillah, W. dan Hartono, J. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Adriana. 2017. [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-jawa](#). Tesis. Maksi FEB UGM
- Afriansyah, R. D. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bardhan, Pranab dan Tsung-Tao Yang. 2004. "Political Competition in Economic Perspective", *BREAD Working Paper* No. 078.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Birkinshaw, M. M. J 2006. How Management Inovation Happens. *MIT Sloan Management Review*, 47 (4), 81.
- Chalid, P. 2005. *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Cruz et al. 2015. Measuring local government transparency. *Public Management Review* ISSN 1471-9037.
- Folscher. 2000. *Transparency and Participation in The Budget Process*. South Africa: A Country Report 1.
- Garcia & Garcia-Garcia. 2010. *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*. *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679-695.
- Garcia-Sanchez, et al. 2013. *Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government*. *Journal of Cleaner Production* 39, 60-72.
- Gudono. 2014. *Analisis Data Multivariat Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi, Muhammad. 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnowati, Attina Izzati Penta. 2017. "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". Tesis. Universitas Lampung.

- Hart, O. 1995. Corporate governance: Some theory and implication. *The Economic Journal*, Vol. 105, No. 430, pp. 678–89.
- Hartono, J. 2011. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Haryanto, Ignatius. 2005. *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Hendriyani, R. dan Tahar, A. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE.)* 22(1): 25 -33.
- Hermana, et al. 2012. “Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia”. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, vol 43, no. 2, pp. 229-235.
- Hilmi, A.Z. & Martani. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Depok: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hirsch, W. Z., Osborne, E. 2000. Privatization of Government Services: Pressure-group Resistance and Service Transparency. *Journal of Labor Research*, 21 (2), 315-326.
- Huwae, K. 2016. Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Maksi FEB Universitas Gadjah Mada.
- Insani. 2017. [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi](#). Tesis. Maksi FEB UGM.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri. No. 188. 52/1797/SC/2012 Tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. No. 3 Tahun 2003 Tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. No. 7 Tahun 2005 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- International Budget Partnership (IBP). 2015. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2012-Report-English.pdf>.
- Jaya, J. D. dan E. A Sisdyani. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9.1, pp. 162-179.

- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership structure". *Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Julisa. 2017. [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan](#). Tesis. Maksi FEB UGM
- Khasanah, N.L. & Rahardjo, S. N. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 3, Hal 1-11.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lane, Jan-Erik. 2003. "Management and public organization: The Principal-Agent Framework". University of Geneva and National University of Singapore. Working Paper. Dikutip dalam Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. Diakses 17 Maret 2018. [https://www.researchgate.net/publication/273257684_Hubungan_dan_Masalah_Keagenan_di_Pemerintahan_Daerah?enrichId:rgreqac1b1656362791c7e9086ef76555de6cXXX&enrichSource:Y292ZXJQYWdlOzI3MzI1NzY4NDtBUzoyMDQ3NjQyODIzOTY2NzJAMTQyNTgzMTAxNzM3MQ%3D%3D&el:1_x_2&esc:publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/273257684_Hubungan_dan_Masalah_Keagenan_di_Pemerintahan_Daerah?enrichId=rgreqac1b1656362791c7e9086ef76555de6cXXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzI1NzY4NDtBUzoyMDQ3NjQyODIzOTY2NzJAMTQyNTgzMTAxNzM3MQ%3D%3D&el:1_x_2&esc:publicationCoverPdf).
- Laswad, et al. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 24, pp. 101-121.
- Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006*. Depok: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Mahbub ul Haq (1995). *Reflections on Human Development*. New York. Oxford University Press. Di akses 15 Maret 2018. https://books.google.co.id/books?id=Cwyv2OtYdGQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
- Martani, D. Fitriyanti, D. & Annisa. 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60, pp 504-518.
- Moon, M. Jae. 2012. The Evolution of e-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*. Vol. 62, No. 4, pp. 424-433.

- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- Putri Diani, Rosita, 2016. Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Program Akuntansi FEB Universitas Sebelas Maset. Surakarta.
- Rahim, W.M. dan Dwi Martani. 2016. “Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah”. Diakses pada 17 Juni 2018. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2016/04/21/analisis-faktor-yang-mempengaruhi-website-pemda/>.
- Rajkumar, Andrew Sunil dan Vinaya Swaroop. 2008. “Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?” *Journal of Development Economics*, 86, 96-111. Diakses 18 Maret 2018. https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Public_spending_and_outcomes_governance.pdf.
- Ritonga dan Syamsul. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol. 20 (2).
- Program Magister Akuntansi. 2017. *MAKSIGAMA INDEKS KEUDA (Indeks Kondisi Keuangan dan Indeks Transparansi Keuangan)*. Yogyakarta: Magister Akuntansi FEB UGM.
- Rodriguez *et al*, 2017. Measuring Local Government Transparency. Influence of Political Sign in Multidimensional Analysis. *Journal of Local Self-Government* Vol. 15, No. 4, pp. 889 – 917.
- Sari, Rora Puspita. 2010. *Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Indonesia pada Situs*

Pemerintah Daerah Tahun 2010. Depok: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sen, Amartya K. 1989. "Food and Freedom." *World Development* 17(6): 769-81.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). 2013. Indeks keterbukaan badan publik menyediakan informasi anggaran secara berkala: mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis *website*. sekretariat@seknasfitra.org/www.seknasfitra.org.

Setyaningrum. 2017. [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Bali, NTB, dan NTT](#). Tesis. Maksi FEB UGM.

Shopia, A. dan Husen, B. 2013. Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website (studi pada kota/kabupaten seluruh Indonesia). *Jurnal Media Indonesia* Vol. 12, No. 4.

Spence, M. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87 (3), 355 – 374.

Styles, Alan K. dan Mack Tennyson. 2007. "The Accessibility Of Financial Reporting of U.S. Municipalities on The Street". *Journal Of Budgeting, Accounting & financial Management*. Vol. 19 (1), pp. 56-92.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.

Trisnawati, M. D. & Achmad, K. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Universitas Brawijaya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 23E Tahun 1945 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang Undang Reublik Indonesia. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang Undang Reublik Indonesia. No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang Undang Reublik Indonesia. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Reublik Indonesia. No. 23 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Reublik Indonesia. No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang Rebuglik Indonesia. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Rebuglik Indonesia. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNDP. 2016. Human Development Report. New York: United Nations Development Programme (UNDP).

United Nations Development Programme. 1990. Human Development Report. New York: UNDP.

www. <http://skalanews.com/detail/korupsi/274593-Terlibat-Korupsi-KPK-17-Gubernur-Telah-Dipenjara>.

www. <https://tirto.id/catatan-hitam-pemimpin-daerah-yang-terjerat-korupsibNcP>.

Rokhimah. (2017). [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Maluku Dan Maluku Utara](#). Tesis. Maksi FEB UGM.

Suwarsih. (2017). [Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sumatra](#). Tesis. Maksi FEB UGM.